

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Green Economy

Pembangunan di negara sedang berkembang sering diidentikkan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator kemajuan ekonomi dan sosial. Peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya diharapkan meningkatkan standar hidup masyarakat tetapi juga menjadi sarana untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasional atau Gross National Product (GNP) per kapita riil. GNP per kapita riil ini menggambarkan seberapa besar pendapatan rata-rata yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk setelah disesuaikan dengan inflasi, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan nyata dari masyarakat di suatu negara. Agar pembangunan dapat dianggap berhasil, tingkat pertumbuhan ekonomi dalam harga konstan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2006). Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan harus dapat mengimbangi atau bahkan melampaui pertambahan jumlah penduduk, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup yang merata. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pendapatan per kapita turun, yang pada akhirnya dapat memperburuk kemiskinan dan

ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya pembangunan harus berfokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Istilah *green economy* pada awalnya dikenalkan oleh James Robertson dan istrinya Alison Pritchard dalam bukunya *The Sane Alternative* yang dipublikasikan pada tahun 1978. Kemudian Hazel Henderson dalam bukunya *The Politics of the Solar Age: Alternatives to Economics*, dipublikasikan pada tahun 1988. Satu tahun setelahnya menjadi *Blueprint* yang dikemukakan oleh Chernobyl dalam bukunya *Blueprint for a Green Economy* yang diterbitkan pada tahun 1989. Masih terkait ekonomi yang berhubungan dengan alam Richard Douthwaite, juga memberikan hasil pemikirannya melalui *The Growth Illusion: How Economic Growth Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet*, yang dipublikasikan tahun 1992. (Pujiati & Aji Damanuri, 2022)

Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga pilar: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberlanjutan ekonomi berarti pertumbuhan tanpa merusak basis modal ekonomi. Seperti kelestarian lingkungan termasuk iklim yang stabil dan keanekaragaman hayati. Ketiga dimensi tersebut perlu diintegrasikan. Ada banyak alat penilaian yang tersedia guna mendukung integrasi ini. Namun dalam praktiknya, pengelolaan hubungan lebih fokus pada rekonsiliasi dibandingkan integrasi, sehingga konsep

ekonomi hijau bisa menjadi solusinya. Ekonomi hijau dimaknai sebagai ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial.

Pada ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur serta aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Maka dapat disimpulkan ekonomi hijau mengupayakan pertumbuhan melalui investasi lingkungan untuk kepentingan masyarakat miskin. Konsep ini membantu mengalihkan fokus diskusi dari rekonsiliasi ke sinergi hubungan (Anwar, 2022). Ekonomi hijau juga menekankan pentingnya inklusivitas sosial dalam upaya mencapai keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang hanya mementingkan aspek ekonomi dan lingkungan tanpa mempertimbangkan aspek sosial akan berisiko menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, ekonomi hijau mendorong pertumbuhan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan tetapi juga menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan yang mendukung lapangan kerja hijau, peningkatan keterampilan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

a. Pengertian *Green Economy*

United Nation Environment Programme (UNEP)

memberikan pengertian bahwasanya *Green Economy* adalah proses

merekonfigurasi ulang bisnis dan infrastruktur mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta mencapai keuntungan yang lebih besar dari investasi pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Secara sederhana, definisi *green economy* (ekonomi hijau) adalah sebagai kegiatan perekonomian yang tidak memberikan dampak negative serta tidak merusak lingkungan. Disisi lain, *United Nation Environment Programme* (UNEP) memadukan gagasan “ekonomi hijau” dengan gagasan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi hijau mengacu pada kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat berdampak pada terwujudnya keadilan, di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Keadilan bagi masyarakat, serta bagi lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Hal ini semakin mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dalam hal ini hakikat ekonomi hijau adalah model ekonomi yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan (Utama, 2019).

Ekonomi hijau adalah perekonomian yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko dan kelangkaan ekologis secara signifikan, dengan kata lain, *green economy* merupakan rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif

secara sosial. Oleh karena itu, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana investasi publik dan swasta untuk mengurangi emisi dan polusi serta meningkatkan efisiensi sumber daya mendorong pertumbuhan dan keuntungan industri. Dari definisi tersebut ada dua hal utama dari tujuan *green economy* yaitu selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *green economy* juga mengurangi kontaminasi atau polusi dari lingkungan sekitar (Agustinus, 2022).

Indonesia memang memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana konsep ekonomi lingkungan hidup dapat diwujudkan. Undang-undang ini lebih bersifat memberikan instrumen kebijakan yang belum menyentuh detail teknis mengenai penerapan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Parmawati, 2019). Instrumen-instrumen seperti perizinan, pengawasan, dan sanksi lebih ditujukan untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan, tetapi belum menjabarkan cara mendorong transformasi ekonomi menuju keberlanjutan.

Untuk mewujudkan ekonomi hijau yang komprehensif dan terarah di Indonesia, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih konkret dan terpadu dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap sektor ekonomi. Sekadar mengandalkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup tidaklah cukup, karena sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, energi, kehutanan, kelautan, pertambangan, industri, perkotaan, dan ketenagakerjaan hijau atau green jobs juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus (Parmawati, 2019) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mencakup reformasi di berbagai sektor tersebut agar mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Ekonomi hijau bukan sekadar permasalahan lingkungan atau ekonomi, melainkan suatu pendekatan holistik yang memerlukan sinergi antara semua elemen masyarakat. Ekonomi hijau bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi selaras dengan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya dan menyerap limbah. Dengan demikian, tidak hanya penting untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, tetapi juga untuk mengubah pola produksi dan konsumsi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kesejahteraan jangka panjang tanpa merusak basis sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi mendatang.

Ekonomi hijau juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang adil dan meminimalkan kerusakan lingkungan serta melaksanakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Konsep ekonomi hijau Indonesia menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya, internalisasi biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang sama serta adil dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Atau dapat dinyatakan bahwa ekonomi hijau adalah kondisi membaiknya kehidupan (*well being*) dan keadilan sosial (*social equity*) dengan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (Dewi et al., 2013).

Terdapat lima ciri-ciri *green economy* yaitu:

- a. Peningkatan investasi berkelanjutan.
- b. Peningkatan dalam aspek kuantitas kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau.
- c. Penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi.
- d. Penurunan CO₂ dan tingkat polusi yang dihasilkan.
- e. Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah.

Adapun faktor-faktor utama pendorong pertumbuhan *green economy* antara lain (Murniningtyas, 2014):

- a. Manajemen pengelolaan SDA dan jasa lingkungan yang baik untuk kemakmuran ekonomi jangka panjang serta berkualitas.

- b. Investasi infrastruktur yang rendah karbon serta tahan iklim yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- c. Menstimulasi investasi maupun inovasi dalam sektor swasta menggunakan teknologi baru yang adaptif, guna memaksimalkan produktivitas SDA penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- d. Fokus kepada SDM guna mendapatkan tenaga kerja terdidik serta terampil, dan diperlukan bagi ekonomi yang kurang bergantung pada ekstraksi sumber daya, serta mendorong hasil sosial yang lebih baik.
- e. Mengatasi kegagalan pasar dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial maupun lingkungan, karena pertumbuhan ekonomi dikatalisis oleh alokasi sumber daya yang lebih efisien.

Selain itu engharmonisasikan kegiatan ekonomi dengan sistem alam memerlukan transformasi yang lebih mendasar pada berbagai aspek, mulai dari pola pikir hingga cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam praktiknya, hal ini memerlukan inovasi dalam teknologi, investasi pada infrastruktur yang berkelanjutan, serta pengembangan kebijakan insentif yang mendukung perubahan menuju ekonomi hijau. Perubahan tersebut juga memerlukan dukungan dari sektor swasta melalui investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi ramah lingkungan, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Menempatkan cita-cita ekonomi hijau ke dalam praktik juga membutuhkan kecerdikan dan kreativitas manusia, baik dari segi pengelolaan sumber daya alam, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, maupun pengelolaan limbah. Selain itu, diperlukan pengetahuan yang terus berkembang terkait keberlanjutan serta peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Peran edukasi sangat penting dalam hal ini, karena hanya dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan ekonomi hijau.

Kesetaraan di seluruh masyarakat juga menjadi prasyarat penting bagi ekonomi hijau yang berhasil. Transformasi ekonomi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi hijau harus bersifat inklusif, artinya kebijakan yang diambil harus memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan yang berkelanjutan dapat dirasakan oleh semua kalangan, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung secara ekonomi. Dalam konteks ini, konsep green jobs menjadi sangat relevan, karena pekerjaan hijau tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

b. Prinsip *Green Economy*

prinsip utama dari *green economy* adalah mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan setiap generasi di masa mendatang. Berikut prinsip-prinsip *green economy* antara lain (Setiyowati, 2023):

- 1) Prinsip Berkelanjutan, yaitu sarana untuk mencapai perekonomian yang berkelanjutan;
- 2) Prinsip Kesejahteraan, memungkinkan setiap orang dapat menyadari serta menikmati kesejahteraan;
- 3) Prinsip Keadilan, memajukan kesetaraan intra serta antar generasi atau mendukung kesetaraan sosial dan ekonomi;
- 4) Prinsip Martabat, menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat;
- 5) Prinsip Alam Sehat, memulihkan keanekaragaman hayati yang hilang, berinvestasi pada sistem alam dan memulihkan hutan yang terdegradasi;
- 6) Prinsip Batas Planet, melindungi, memulihkan dan berinvestasi pada alam;
- 7) Prinsip Inklusi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara inklusif dan partisipatif.
- 8) Prinsip *governance* dan Akuntabilitas, maksudnya harus bisa dipertanggungjawabkan;

- 9) Prinsip Ketahanan, berkontribusi pada ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan;
- 10) Prinsip Efisiensi dan Kecukupan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- 11) Prinsip Generasi, berinvestasi untuk masa kini dan masa yang akan datang;
- 12) Prinsip Kesejahteraan, mendorong seluruh orang mampu menikmati kesejahteraan dan kekayaan alam;
- 13) Prinsip Pemerintah yang Baik, berpedoman pada kelembagaan yang terbukti, terintegrasi dan akuntabel.

Konsep "*Green Economy*" tidak menggantikan konsep "pembangunan berkelanjutan", akan tetapi saat ini telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terdapat hampir sepenuhnya berada pada konsep ekonomi yang tepat. Adapun konsep green economy yang disepakati UNEP, mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut (Zahari & Sudirman, 2017):

- 1) Mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam,
- 2) Mengurangi kemiskinan,
- 3) Meningkatkan pembukaan usaha dan keseimbangan sosial,
- 4) mengganti penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi,

- 5) Meningkatkan penggunaan sumber daya dan energi yang lebih tepat guna,
- 6) Mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan,
- 7) Bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam.

Sedangkan menurut para pakar lainnya, sepuluh prinsip Ekonomi Hijau, sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik dan kualitas, mengikuti aliran alam,
- 2) Sampah adalah makanan (keluaran suatu proses menjadi asupan untuk proses yang lain),
- 3) Rapi dan keragaman fungsi,
- 4) Skala tepat guna/skala keterkaitan,
- 5) Keanekaragaman,
- 6) Kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri,
- 7) Partisipasi dan demokrasi yang langsung,
- 8) Kreativitas dan pengembangan masyarakat,
- 9) Peran strategis dalam lingkungan buatan, lanskap dan
- 10) Perancangan spasial (Zahari & Sudirman, 2017).

Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau dan ekonomi berkelanjutan tidak berbeda satu sama lain, dan keberadaan keduanya menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Tentu saja investasi merupakan elemen terpenting dalam sistem perekonomian. Ketika elemen ini dimasukkan ke dalam konsep ekonomi hijau, maka menjadi investasi ramah lingkungan

(*green investment*). Adanya konsep ekonomi hijau bukanlah pengganti pembangunan berkelanjutan, melainkan sebuah penegasan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan bahwa masyarakat hidup dalam model ekonomi yang tepat, ramah lingkungan, dan ramah lingkungan. Dan model perekonomian yang dimaksud adalah perekonomian yang tumbuh berdasarkan keadilan sosial dan keadilan lingkungan keadilan yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan investasi sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan inklusi sosial masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Huda, 2017). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang signifikan ketika menganalisis kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa besar penghasilan tambahan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dari individu dalam periode waktu yang ditentukan (Patra, 2022).

Simon Kuznets (1955) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor-faktor dari pertumbuhan ekonomi yang

dikemukakan oleh Todaro (2006) yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Bagi para ekonom, perkembangan teknologi memiliki peran yang lebih signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat membawa peningkatan signifikan dalam nilai tambahan. Kemajuan dalam bidang teknologi mencakup perkembangan dalam metode produksi, penyebaran, dan penggunaan barang dan jasa dengan lebih efektif serta efisien (Badriah, 2019).

Membangun perekonomian merujuk pada proses meningkatkan pendapatan per individu dalam masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Pendapatan per kapita dalam evaluasi pembangunan ekonomi mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan antara daerah-daerah yang berbeda. Dalam situasi ini, diasumsikan bahwa tingkat kekayaan suatu wilayah tercermin dari rata-rata penghasilan yang diterima oleh penduduknya. Semakin besar penghasilan tersebut, semakin besar kemampuan penduduk dalam membeli barang dan jasa, dan kenaikan ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Analisis ini menunjukkan bahwa informasi mengenai pendapatan per individu dapat dimanfaatkan untuk tiga tujuan berikut ini:

- a. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu daerah pada satu tahun tertentu,
- b. Menggambarkan tingkat kelajuan pembangunan ekonomi,
- c. Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi diantaranya (Putri, 2021):

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Keanekaragaman hayati yang luar biasa menghiasi Indonesia, menjadikannya negara yang sangat kaya secara alamiah. Ini menjadikan alam sebagai faktor paling penting dalam perekonomian Indonesia. Itulah sebabnya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM berperan sebagai pengarah perkembangan suatu negara. SDM yang berkualitas diukur oleh individu yang efisien yang berperan sebagai motor penggerak dalam organisasi, baik di perusahaan maupun organisasi lainnya.

c. Modal Kumulatif

Peningkatan modal sebagai pengumpulan faktor produksi yang dapat diperbaharui. Proses peningkatan modal melibatkan peningkatan jumlah peralatan, mesin, dan bangunan buatan sebagai modal riil. Jika ada peningkatan akumulasi modal selama periode waktu tertentu, ini hanya dapat dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur, yaitu total investasi dikurangi depresiasi. Baik PDB maupun keduanya adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Model Harod-Domar dalam pertumbuhan ekonomi mengijinkan peningkatan investasi yang lebih besar dengan meningkatkan tingkat simpanan, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

d. Manajer dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi merupakan peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi. Ini berhubungan erat dengan penggunaan elemen-elemen produksi dalam beragam aktivitas ekonomi. Pengaturan serta pelaksanaan operasional sehari-hari di organisasi produksi juga dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab.

e. Teknologi

Inovasi dan perkembangan teknologi memiliki hubungan erat dengan perubahan cara produksi, sehingga perubahan teknologi dianggap sebagai faktor kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ini mengaburkan garis antara waktu dan tempat serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan sektor industri baru yang mendorong perkembangan ekonomi. Di masa lalu, barang-barang dipertukarkan secara langsung dengan menyentuh item-item tersebut, tetapi sekarang pertukaran tersebut terjadi secara online melalui teknologi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara tidak langsung oleh pergerakan ekonomi.

Di tingkat ekonomi secara keseluruhan, perkembangan teknologi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi yang lebih baik. Majunya teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat kompetisi negara dalam pembangunan sektor ekonomi. Meningkatkan pendapatan nasional dengan perusahaan yang berbasis di sana akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi dan kinerja manusia, aset keuangan, dan komponen produksi lainnya.

f. Faktor Politik dan Kontrol Nasional

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur politik dan administrasinya. Pembangunan ekonomi akan terhambat oleh ketidakstabilan politik dan tindakan korupsi dalam pemerintahan. Selain itu, perkara sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti tindakan, sikap, alasan bekerja, pandangan terhadap lembaga sosial dan masyarakat, hukum dan ketertiban, kekurangan dalam desain, dan penerapan kebijakan hukum, menjadi penghalang bagi kemajuan ekonomi. Akibatnya, tidak ada dukungan bagi pelaksanaan pertumbuhan ekonomi. Demikianlah, penegakan hukum harus dilakukan dengan konsisten dan tertib.

Menurut Suparmoko dalam (Moch. Zainuddin, 2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara diperlukan alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara. Alat ukur pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam waktu satu tahun, yang diukur berdasarkan harga pasar. Pertumbuhan ekonomi sulit diukur oleh PDB karena semakin banyak penduduk, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh negara.

b. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan total pendapatan nasional yang dibagi oleh jumlah penduduk yang ada. Pengukuran pertumbuhan berdasarkan pendapatan rata-rata per orang lebih akurat dalam mencerminkan pertumbuhan daripada hanya mengandalkan PDB. Bank Dunia menggunakan alat ini untuk memantau kemajuan sebuah negara.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, sejak ekonom

klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul *The Wealth of Nations* pada tahun 1776 (Muljawan & Dkk, 2020).

a. Definisi Ekonomi Syariah

Pejuang Ekonomi Islam Indonesia, Prof. Dr. KH. Didin Hafidudin mempunyai pandangan menarik tentang hubungan Islam dan Ekonomi. Menurut Kyai Didin, ditinjau dari sudut bahasa, kata "Islam" berarti kedamaian (*peace*), kesucian (*purity*), kepatuhan (*submission*), dan ketaatan (*obedience*). Sedangkan secara istilah, Islam berarti kepatuhan terhadap kehendak dan kemauan Allah Swt serta taat kepada hukum dan aturan-Nya. Abdurrahman an-Nahlawi mengungkapkan bahwa Islam adalah aturan Allah yang sempurna yang mericakup berbagai bidang kehidupan, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta, atas dasar ketundukkan dan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya (Hosen, 2022).

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara

sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadist (Muljawan & Dkk, 2020).

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip *derivatif* itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), “*adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah*

pemerintah, dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2) Prinsip ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka

bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3) *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena

itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim. Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Berikut ini penjelasan pentingnya dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi (Rozalinda, 2014):

a) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap

kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan amar maruf nahi munkar. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat *amanah* memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban *amanah* yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d) *Fathanah* (intelektual)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar

dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

4) *Khilafah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda:

“setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”.

Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia. Dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini

dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal. Kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahh untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan *superioritas* (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya

Dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

c. Telaah Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan *green economy* sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi syariah sudah ada yang meneliti. Beberapa penelitian yang terkait dengan ketimpangan pendapatan sebagai berikut:

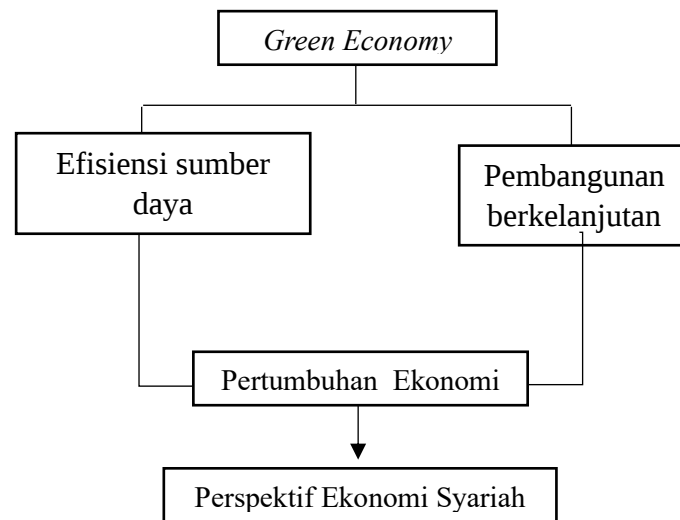
1. Mutmainah, Amir Hamza, Galuh Mustika Argarini (2023) dengan judul penelitian “*Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis ekonomi hijau dari perspektif ekonomi Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), Teknik analisis data dengan menggunakan model Milles dan Huberman meliputi: (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: konsep ekonomi hijau atau *green economy* merupakan kegiatan ekonomi rendah karbon, menghemat sumber daya (*resource efficient*), dan bersifat inklusif sosial/*socially inclusive*, dimana konsep ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu *Islamic Eco-Fithics* yang terdiri dari beberapa prinsip dasar etika Islam seperti *al-adl* (keadilan), *masalahah* (kebutuhan umum), *urf* (adat istiadat), *istishlah* (perbaikan), dan *i'tidal* (keharmonisan), sehingga ekonomi hijau merupakan suatu bentuk perbaikan ekonomi yang selaras dengan alam dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

yaitu penelitian ini hanya berfokus pada analisis teoretis dan konseptual tanpa mengeksplorasi dampak ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi secara empiris. Selain itu, penulis juga akan memperdalam analisis tentang bagaimana penerapan *green economy* dalam perspektif ekonomi syariah berdampak langsung pada indikator pertumbuhan ekonomi

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Vita Lestari Sochardi (2022) dengan judul penelitian “Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Berbasis *Green Economy*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas konsep antara *green economy* dengan Ekonomi Syariah di Indonesia dengan tujuan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan juga *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kontep *green economy* selaras dengan konsep Ekonomi Syariah. Peran Ekonomi Syariah di Indonesia dalam perspektif *Green Economy*, diantaranya: Prinsip Sosial dan Erika Bisnis Islam. Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Mengurangi Permasalahan Sosial, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dan Prinsip Falah yang mencakup menjaga agama, pemeliharaan jiwa, menjaga akal, penjagaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji efek ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan berfokus pada aspek keberlanjutan.
3. Penny Charifi Lumbanraja, Pretty Luci Lumbanraja (2023) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Variabel Ekonomi Hijau (*Green Economy*

Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS". Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isu penerapan ekonomi hijau terhadap pertumbuhan pendapatan Indonesia, Pertumbuhan negara dengan menerapkan sistem ekonomi hijau menjadi solusi untuk mendapatkan tujuan pembangunan negara yang berkelanjutan. Penelitian ini bersifat eksplorasi yang menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan pada rentang 2011-2020 (10 tahun) dengan teknik analisis data SEM-PLS. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara ekonomi hijau terhadap pendapatan negara dengan hasil $p (0.000) < 0,05$ yang memberikan besar pengaruh 0,965. Nilai pengaruh sebesar 0.965 memberi makna bahwa dengan penerapan ekonomi hijau akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan negara di Indonesia. Akhirnya, dari studi empiris yang dilakukan didapatkan bahwa pembangunan negara harus melibatkan sistem hijau di masa depan dengan fokus pada arah, kebijakan, organisasi, area, kapasitas, dan campur tangan dari setiap pihak sebagai strategi perluasan yang optimal derri tercapainya terc aktivitas perekonomian Indonesia yang memperhatikan kondisi lingkungan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan hanya menggunakan variabel pendapatan sebagai indikator ekonomi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan perspektif ekonomi syariah. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan memperluas cakupan dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhkamat Anwar, dengan judul “*Green Economy* Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekonomi hijau terhadap pemulihan ekonomi dan masalah multilateral. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan jenis atau pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta permasalahan dibidang multilateral. Agar ekonomi hijau terealisasi bagi negara maka pembuat kebijakan harus didukung oleh berbagai pihak sehingga terbentuk ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ekonomi hijau juga berkontribusi untuk memelihara lingkungan yang sehat dan membentuk ekosistem secara tepat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Penelitian ini tidak membahas secara khusus kontribusi ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari perspektif syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengisi kekosongan ini dengan lebih fokus pada efek implementasi strategi *green economy* terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi Syariah.

d. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran